

Pendidikan Damai yang Membumi: Sintesis Konseptual Visi Keislaman Ahmad Syafii Maarif dan Teori Perdamaian Positif Johan Galtung

Daffa Nur Fauzy^{1✉}, Fikri Haikal², A.R. Bahry Al Farizi³

Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Indonesia

UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

Pegiat Pendidikan Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

Received: 2026-02-10 | Revised: 2026-04-15 | Accepted: 2026-06-30

Abstract

Amid the challenges of Indonesian nationhood, marked by rising intolerance and social polarization, peace education has become an unavoidable urgency. Islamic education, as the moral foundation of the majority of the nation, is often confronted with a dilemma between a formalistic-ritualistic approach detached from social realities and the urgent need to respond to issues of injustice. This article aims to formulate a conceptual framework of “Grounded Peace Education” by synthesizing Ahmad Syafii Maarif’s Islamic-humanist vision with Johan Galtung’s theory of Positive Peace. Using a qualitative literature review through a conceptual synthesis approach, the thoughts of both figures are analyzed in depth to discover fundamental points of convergence and to construct a more comprehensive educational model. The synthesis reveals that Syafii Maarif’s vision of substantive Islam—emphasizing authentic morality, social justice, and universal humanity—is functionally aligned with Galtung’s concept of Positive Peace, which seeks the elimination of structural and cultural violence. The resulting model of “Grounded Peace Education” transcends the goal of negative peace (mere absence of direct conflict). Instead, it seeks to shape learners into proactive agents of change, capable of critically analyzing and dismantling the roots of systemic injustice and cultural justifications of violence, as an authentic manifestation of faith and a form of responsible citizenship.

Keywords: Peace Education; Positive Peace; Ahmad Syafii Maarif; Johan Galtung

Pendahuluan

Kain tenun kebangsaan Indonesia, yang dirajut dari benang-benang keragaman suku, agama, dan budaya, kini menghadapi ujian berat. Lanskap sosial-politik kontemporer menunjukkan gejala-gejala erosi kohesi sosial yang mengkhawatirkan. Laporan-laporan dari berbagai lembaga masyarakat sipil secara konsisten mendokumentasikan meningkatnya intoleransi, merebaknya konflik berbasis identitas, dan menguatnya polarisasi di ruang publik (Mentari Angela, Wahyu Edi Tanaya, 2021). Data yang dirilis oleh Wahid Foundation, misalnya, menunjukkan bahwa meskipun terjadi penurunan jumlah peristiwa pelanggaran Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (KBB) pada tahun 2021 dibandingkan 2020, jenis pelanggaran seperti ujar kebencian (*hate speech*) tetap menempati urutan teratas. Hal ini mengindikasikan bahwa meski kekerasan fisik mungkin menurun, benih-benih permusuhan di level wacana dan ideologi justru berkembang biak, seringkali difasilitasi oleh media sosial (Wahid Foundation, 2022). Laporan dari SETARA Institute juga mengafirmasi tren ini, menyoroti bagaimana restriksi negara dan intoleransi masyarakat seringkali berkelindan, menciptakan ekosistem yang rentan terhadap diskriminasi dan kekerasan (Setara Institute, 2008).

Fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari instrumentalisasi politik identitas, di mana sentimen agama dan etnis dieksploitasi untuk mobilisasi politik, terutama selama momentum kontestasi elektoral (Pujangga Candrawijyaning Fajri, 2024). Politik identitas mengubah perbedaan yang seharusnya menjadi kekayaan menjadi sumber perpecahan, mengkonstruksi narasi "kita" versus "mereka" yang merusak pondasi Bhinneka Tunggal Ika (M. Ali, 2024). Kasus-kasus seperti konflik komunal di Tanjung Balai yang dipicu oleh isu sensitif terkait rumah ibadah, atau polarisasi tajam selama Pilkada DKI Jakarta 2017, adalah contoh nyata bagaimana politik identitas dapat memicu kekerasan dan merusak tatanan sosial (M. Ali, 2024).

Dalam konteks inilah, peran pendidikan, khususnya Pendidikan Agama Islam (PAI), menjadi sangat krusial sekaligus paradoks. Di satu sisi, PAI diharapkan menjadi garda terdepan dalam menanamkan nilai-nilai perdamaian, toleransi, dan persaudaraan. Namun di sisi lain, praktik pendidikan Islam di Indonesia menghadapi tantangan internal yang fundamental. Salah satu kritik paling tajam datang dari cendekiawan Muslim, Ahmad Syafii Maarif, yang menyoroti adanya kecenderungan formalisme agama. Menurutnya, banyak praktik keagamaan yang terjebak pada penekanan simbol, ritual, dan aspek-aspek formal lainnya, namun mengabaikan substansi ajaran Islam yang paling inti: penegakan moralitas, keadilan sosial, dan kemanusiaan (Maarif, 2021). Akibatnya, lahirlah individu-individu yang mungkin taat secara ritual, namun abai terhadap penderitaan sesama, bahkan bisa bersikap intoleran terhadap mereka yang berbeda. Syafii Maarif secara pedas mempertanyakan klaim Al-Qur'an tentang "umat terbaik" (*khairu ummah*) jika umat Islam secara internal masih rapuh oleh konflik dan secara eksternal gagal menjadi rahmat bagi semesta (Suara Muhammadiyah, 2016).

Problem kedua adalah apa yang disebut Syafii Maarif sebagai dualisme dikotomis ilmu, yaitu pemisahan artifisial antara "ilmu-ilmu agama" dan "ilmu-ilmu umum (sekuler)" (Idebahasa, n.d.). Dikotomi ini, menurutnya, telah mereduksi agama menjadi urusan teologis-

ritualistik semata dan membuat pendidikan Islam gagap dalam merespons tantangan zaman yang kompleks. Akibatnya, pendidikan Islam seringkali gagal melahirkan intelektual yang mampu mendialogkan teks suci dengan realitas sosial yang terus berubah, dan berkontribusi pada kemajuan peradaban (Pujangga Candrawijayaning Fajri, 2024).

Kombinasi antara tantangan eksternal (polarisasi sosial) dan kelemahan internal (formalisme dan dualisme) ini menempatkan pendidikan damai yang ada saat ini pada posisi yang sulit. Banyak program pendidikan damai hanya berhenti pada tataran promosi toleransi atau kerukunan antarumat beragama. Meskipun penting, pendekatan ini seringkali bersifat dangkal karena hanya menyentuh permukaan, yaitu mencegah konflik langsung, tanpa membongkar akar masalahnya. Pendekatan semacam ini, dalam terminologi Johan Galtung, hanya mencapai "Perdamaian Negatif". Dari sinilah "celah" atau research gap dalam penelitian ini teridentifikasi. Hingga saat ini, belum banyak kajian yang secara sistematis dan mendalam berupaya melakukan sintesis konseptual antara pemikiran seorang tokoh Islam-Indonesia yang humanis dan membumi seperti Ahmad Syafii Maarif dengan kerangka teoritis perdamaian yang paling komprehensif dan kritis dalam studi perdamaian, yaitu teori Perdamaian Positif Johan Galtung (Wafi, 2020). Artikel ini berargumen bahwa penggabungan kedua kerangka pemikiran ini dapat menghasilkan sebuah model pendidikan damai yang jauh lebih utuh, kritis, dan relevan untuk menjawab tantangan keindonesiaan kontemporer.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, penelitian ini dirumuskan dalam tiga pertanyaan utama:

- (1) Bagaimana konsep pendidikan Islam menurut Ahmad Syafii Maarif, yang menekankan Islam substantif dan kemanusiaan universal, dapat menjadi landasan etis-teologis untuk pendidikan damai yang transformatif?
- (2) Bagaimana teori Perdamaian Positif Johan Galtung, dengan konsep kekerasan struktural dan kulturalnya, dapat menyediakan perangkat analisis sosial-kritis untuk merancang pendidikan damai yang melampaui sekadar toleransi?
- (3) Bagaimana sintesis sistematis dari visi etis Syafii Maarif dan analisis kritis Galtung dapat menghasilkan sebuah model konseptual "Pendidikan Damai yang Membumi" yang relevan dan aplikatif untuk konteks Indonesia?

Tujuan utama dari penulisan artikel ini adalah untuk membangun dan mengartikulasikan sebuah kerangka konseptual pendidikan damai dalam Islam yang komprehensif, kritis, dan berakar kuat pada tradisi intelektual Islam humanis yang relevan dengan konteks keindonesiaan.

Argumentasi sentral yang diajukan adalah bahwa sintesis pemikiran Ahmad Syafii Maarif dan Johan Galtung menghasilkan sebuah model pendidikan damai yang secara kualitatif lebih unggul dan holistik. Visi Islam substantif Syafii Maarif menyediakan landasan teologis-etis yang kokoh, otentik, dan memotivasi, yang memberikan "jiwa" dan "tujuan moral" pada pendidikan damai. Sementara itu, konsep Perdamaian Positif Johan Galtung memberikan perangkat analisis sosial-kritis yang tajam, yang berfungsi sebagai "pisau bedah" untuk mendiagnosis akar-akar kekerasan yang tersembunyi dalam masyarakat. Sintesis keduanya melahirkan sebuah model "Pendidikan Damai yang Membumi": sebuah pendekatan pendidikan yang tidak hanya bertujuan menolak kekerasan langsung (mencapai

damai negatif), tetapi secara proaktif membongkar kekerasan struktural dan kultural, dengan tujuan akhir mewujudkan keadilan sosial sebagai manifestasi tertinggi dari iman dan kemanusiaan.

METODE

Artikel ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode kajian pustaka (library research) (Ayuningtyas, 2023). Metode ini dipilih karena tujuan penelitian adalah membangun sebuah kerangka teoritis baru melalui analisis dan integrasi pemikiran dari dua tokoh utama, bukan melakukan penelitian empiris di lapangan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori utama. Sumber data primer mencakup karya-karya fundamental dan representatif dari Ahmad Syafii Maarif, seperti buku-buku, esai, dan artikel jurnal yang memuat gagasan-gagasannya tentang Islam, keindonesiaan, kemanusiaan, dan pendidikan (Maarif, 2021). Demikian pula, karya-karya seminal dari Johan Galtung, terutama artikelnya yang berjudul "Violence, Peace, and Peace Research" (1969) dan tulisan-tulisan lain yang mengelaborasi konsep perdamaian negatif-positif serta kekerasan struktural-kultural, menjadi rujukan primer (Galtung, 1969; Galtung, 1990).

Sumber data sekunder meliputi jurnal-jurnal akademik, buku, laporan penelitian, dan artikel ilmiah yang mengkaji, menganalisis, atau mengomentari pemikiran kedua tokoh tersebut, serta literatur yang relevan mengenai konteks intoleransi di Indonesia dan model-model pendidikan damai (M. Ali, 2024).

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode sintesis konseptual. Ini adalah sebuah proses analitik yang melampaui sekadar kompilasi atau perbandingan gagasan. Proses ini melibatkan tiga langkah kerja yang sistematis:

- (1) Dekonstruksi: Tahap pertama adalah menguraikan dan menganalisis secara mendalam elemen-elemen kunci dari masing-masing kerangka pemikiran. Pada tahap ini, konsep "Islam Substantif" Syafii Maarif dan "Perdamaian Positif" Galtung akan dibedah untuk memahami asumsi dasar, komponen utama, dan logika internalnya.
- (2) Konvergensi: Tahap kedua adalah mengidentifikasi titik-titik temu, paralelisme logis, dan keselarasan fungsional antara kedua kerangka pemikiran tersebut. Proses ini mencari jawaban atas pertanyaan: Di mana kritik Syafii Maarif terhadap formalisme agama bertemu dengan analisis Galtung tentang kekerasan kultural? Di mana seruan Syafii Maarif untuk keadilan sosial beresonansi dengan kritik Galtung terhadap kekerasan struktural?
- (3) Rekonstruksi: Tahap terakhir adalah mengintegrasikan elemen-elemen yang telah teridentifikasi konvergen tersebut ke dalam sebuah kerangka konseptual baru yang koheren, yaitu model "Pendidikan Damai yang Membumi". Model baru ini diharapkan memiliki daya jelas dan kekuatan analitis yang lebih besar daripada masing-masing komponennya secara terpisah, karena ia menggabungkan kedalaman etis-spiritual dengan ketajaman analisis sosial-kritis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Melampaui Absennya Perang: Konsep Perdamaian Positif Johan Galtung

Pemikiran sosiolog Norwegia, Johan Galtung, sering disebut sebagai "Bapak Studi Perdamaian" (Father of Peace Studies), telah merevolusi cara kita memahami konsep perdamaian dan kekerasan (Harvard Religion and Public Life, 2023). Kontribusi utamanya adalah dekonstruksi atas pemahaman konvensional tentang perdamaian sebagai sekadar ketiadaan perang. Galtung memperkenalkan sebuah tipologi yang lebih kompleks dan kritis, yang menjadi fondasi bagi studi perdamaian modern.

1.1 Perdamaian Negatif (Negative Peace)

Galtung memulai analisisnya dengan konsep Perdamaian Negatif, yang didefinisikan sebagai ketiadaan kekerasan langsung (absence of direct violence) atau ketiadaan perang (Galtung, 1969). Ini adalah kondisi di mana tidak ada lagi tembakan senjata, perkelahian fisik, atau konflik bersenjata yang terorganisir (Burak Ercoşkun, 2021). Perdamaian negatif adalah kondisi gencatan senjata, situasi di mana kelompok-kelompok yang bertikai sepakat untuk tidak saling menyerang, atau sebuah tatanan yang dijaga oleh kekuatan represif. Meskipun kondisi ini jelas lebih baik daripada perang terbuka, Galtung menegaskan bahwa ini adalah pemahaman perdamaian yang sangat terbatas dan rapuh (Atack, 2016). Perdamaian negatif tidak menyentuh akar penyebab konflik; ia hanya menekan gejalanya. Masyarakat yang hidup dalam perdamaian negatif bisa jadi masih dipenuhi oleh ketidakadilan, penindasan, dan kebencian yang sewaktu-waktu dapat meledak kembali menjadi kekerasan langsung.

1.2 Kekerasan Struktural (Structural Violence)

Untuk memahami perdamaian yang sejati, Galtung mengajak kita untuk terlebih dahulu memahami bentuk-bentuk kekerasan yang lebih tersembunyi. Ia memperkenalkan konsep Kekerasan Struktural, yang didefinisikan sebagai kekerasan yang tertanam di dalam struktur sosial, politik, dan ekonomi itu sendiri (Burak Ercoşkun, 2021). Ini adalah kekerasan yang tidak memiliki pelaku personal yang jelas, melainkan disebabkan oleh cara sistem atau institusi diorganisir. Kekerasan struktural terjadi ketika struktur sosial menghalangi individu atau kelompok tertentu dari pemenuhan kebutuhan dasar dan potensi kemanusiaan mereka (Galtung, 1990).

Bentuk kekerasan ini seringkali "tidak terlihat" dan bekerja secara perlahan, namun dampaknya bisa sama mematikannya dengan kekerasan langsung. Contoh konkret dari kekerasan struktural meliputi:

- (1) Kemiskinan Sistemik: Sistem ekonomi yang secara inheren menguntungkan segelintir orang dan memiskinkan mayoritas.
- (2) Diskriminasi Hukum: Peraturan perundang-undangan yang secara sistematis merugikan kelompok minoritas, perempuan, atau kelompok rentan lainnya.
- (3) Akses yang Tidak Merata: Ketimpangan akses terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan, dan kesempatan kerja yang disebabkan oleh faktor kelas sosial, etnis, atau lokasi geografis.

- (4) Eksploitasi: Struktur politik atau ekonomi yang memungkinkan satu kelompok mengeksploitasi sumber daya atau tenaga kerja kelompok lain.

Galtung berargumen bahwa penderitaan manusia yang disebabkan oleh kemiskinan global sebuah manifestasi kekerasan struktural memiliki "tingkat besaran" (order of magnitude) yang sebanding dengan penderitaan akibat perang dunia (Atack, 2021). Oleh karena itu, perdamaian sejati tidak akan pernah tercapai selama struktur-struktur yang tidak adil ini masih dibiarkan utuh.

1.3 Kekerasan Kultural (Cultural Violence)

Lebih lanjut, Galtung mengembangkan konsep Kekerasan Kultural. Ini didefinisikan sebagai aspek-aspek dalam sebuah kebudayaan—yang termanifestasi dalam agama, ideologi, bahasa, seni, dan ilmu pengetahuan—yang digunakan untuk melegitimasi atau menjustifikasi kekerasan langsung dan struktural (Galtung, 1990). Kekerasan kultural membuat kekerasan langsung dan struktural terasa, terlihat, atau dianggap "benar" (right), atau setidaknya "tidak salah" (not wrong) (Harvard Religion and Public Life, 2023). Ia berfungsi sebagai semacam "pelumas" ideologis yang memungkinkan roda kekerasan terus berputar tanpa hambatan moral.

Contoh-contoh kekerasan kultural sangat beragam:

- (1) Ideologi Rasisme: Keyakinan akan superioritas satu ras atas ras lain yang digunakan untuk menjustifikasi perbudakan dan kolonialisme.
- (2) Tafsir Agama Eksklusif: Penafsiran ajaran agama yang menggambarkan kelompok lain sebagai "musuh Tuhan", "sesat", atau "kafir", sehingga diskriminasi atau bahkan persekusi terhadap mereka dianggap sebagai tindakan yang dibenarkan secara teologis.
- (3) Nasionalisme Agresif: Paham kebangsaan yang mengagungkan bangsa sendiri dan merendahkan bangsa lain, yang digunakan untuk melegitimasi perang dan penjajahan.
- (4) Sanitasi Bahasa: Penggunaan eufemisme untuk menyembunyikan kebrutalan kekerasan. Galtung mencontohkan bagaimana perbudakan yang brutal disederhanakan menjadi istilah "diskriminasi" (untuk kekerasan struktural) dan "prasangka" (untuk kekerasan kultural), yang menghilangkan bobot penderitaan historisnya (Harvard Religion and Public Life, 2024).

Ketiga bentuk kekerasan ini—langsung, struktural, dan kultural—saling terkait dalam sebuah "segitiga kekerasan" (violence triangle) yang saling memperkuat. Kekerasan kultural memberikan justifikasi bagi kekerasan struktural, dan keduanya seringkali memicu ledakan kekerasan langsung.

1.4 Perdamaian Positif (Positive Peace)

Berdasarkan analisis kritis terhadap berbagai bentuk kekerasan tersebut, Galtung merumuskan tujuan akhir dari upaya perdamaian, yaitu Perdamaian Positif. Jika perdamaian negatif adalah ketiadaan kekerasan langsung, maka Perdamaian Positif adalah ketiadaan kekerasan struktural dan kultural (GW Blogs, 2023). Lebih dari itu, Perdamaian Positif juga

berarti hadirnya kondisi-kondisi yang memungkinkan keadilan sosial, kesetaraan, kerja sama yang saling menguntungkan, dan pemenuhan potensi kemanusiaan secara penuh.

Perdamaian positif bukanlah sebuah kondisi statis atau utopia yang mustahil dicapai. Sebaliknya, ia adalah sebuah proses dinamis dan berkelanjutan untuk membangun masyarakat yang adil, inklusif, dan harmonis (Vision of Humanity, 2021). Ini adalah perdamaian yang dibangun melalui jalan damai (peace by peaceful means), yang melibatkan transformasi konflik secara konstruktif, dialog, dan pemberdayaan kelompok-kelompok yang terpinggirkan (Burak Ercoşkun, 2021). Bagi Galtung, pendidikan damai yang sejati harus menargetkan pencapaian Perdamaian Positif, bukan sekadar puas dengan kondisi rapuh dari Perdamaian Negatif.

2. Islam Substantif dan Kemanusiaan Universal: Visi Pendidikan Ahmad Syafii Maarif

Ahmad Syafii Maarif, yang dikenal sebagai "Guru Bangsa", adalah seorang sejarawan, intelektual, dan pemimpin Muslim Indonesia yang pemikirannya secara konsisten berpusat pada upaya untuk "membumikan" ajaran Islam dalam konteks keindonesiaan dan kemanusiaan modern (Maarif, 2021). Visi pendidikannya lahir dari sebuah kegelisahan mendalam terhadap kondisi umat Islam yang, menurutnya, seringkali terjebak dalam kesalehan yang dangkal dan tercerabut dari persoalan nyata bangsanya.

2.1 Kritik terhadap Formalisme Agama

Inti dari kegelisahan intelektual Syafii Maarif adalah kritiknya yang tajam terhadap formalisme agama. Ia mengamati adanya fenomena di mana praktik beragama lebih mementingkan aspek-aspek lahiriah, simbol, dan ritual, sementara esensi atau substansi ajaran diabaikan (Rahman, 2022). Ia mengkritik keras para elit politik yang menggunakan jargon-jargon Islam hanya untuk kepentingan kekuasaan, padahal perilaku mereka jauh dari nilai-nilai keadilan dan kejujuran yang diajarkan Islam (Islami.co, 2024).

Bagi Maarif, agama yang hanya berhenti pada formalisme adalah agama yang mandul. Ia tidak mampu memberikan solusi atas masalah-masalah kemanusiaan seperti kemiskinan, korupsi, dan ketidakadilan. Lebih berbahaya lagi, formalisme agama yang sempit dapat menjadi lahan subur bagi eksklusivisme dan intoleransi. Ketika pemahaman agama direduksi menjadi klaim kebenaran tunggal yang kaku, maka pintu dialog tertutup dan pandangan yang berbeda dianggap sebagai ancaman. Inilah yang mendorongnya untuk terus-menerus menantang narasi-narasi keagamaan yang memecah belah dan mempertanyakan secara kritis klaim superioritas moral jika tidak dibuktikan dengan kontribusi nyata bagi peradaban (Suara Muhammadiyah, 2016).

2.2 Islam sebagai Etika Sosial dan Kemanusiaan Universal

Sebagai antitesis dari formalisme, Syafii Maarif menawarkan gagasan Islam Substantif. Baginya, inti dari ajaran Islam bukanlah sekadar ritual penyembahan, melainkan penegakan moralitas dan etika sosial dalam kehidupan (M. Lintang Maulana Zulfan, 2022). Misi utama Islam, sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an, adalah menjadi rahmat bagi

seluruh alam (rahmatan lil 'alamin), yang berarti Islam harus mampu menebarkan kedamaian, keadilan, dan kasih sayang tidak hanya untuk sesama Muslim, tetapi untuk seluruh umat manusia, bahkan seluruh makhluk (Muhammad Fuad Fathul Majid, 2023).

Dalam pandangan ini, nilai-nilai seperti keadilan ('adl), kesetaraan (musawah), dan kemaslahatan umum (maslahah 'ammah) adalah pilar-pilar utama ajaran Islam. Menjadi seorang Muslim yang sejati berarti menjadi pribadi yang peduli terhadap nasib kaum lemah dan tertindas (mustadh'afin), berjuang melawan segala bentuk kezaliman, dan secara aktif berkontribusi pada terciptanya tatanan sosial yang lebih adil dan manusiawi (Maarif, 2021).

Visi Islam Substantif ini secara langsung berimplikasi pada konsep pendidikannya. Syafii Maarif menolak keras dualisme dikotomis antara ilmu agama dan ilmu umum (Profetika, n.d.). Baginya, pemisahan ini telah melumpuhkan intelektualitas Muslim. Ia mendambakan sebuah pendidikan integratif yang menyatukan kebudayaan dzikir (refleksi spiritual dan penghayatan iman) dengan kebudayaan fikr (penalaran rasional dan pemikiran kritis) (Ayuningtyas, 2024). Tujuan akhir dari pendidikan Islam, menurutnya, adalah untuk "mewujudkan manusia beriman yang memiliki keunggulan intelektual,... kaya dalam amal serta anggun dalam moral dan kebajikan (hikmah)" (Ayuningtyas, 2024). Pendidikan harus mampu melahirkan individu yang spiritualitasnya mendalam, nalarnya tajam, dan kepedulian sosialnya tinggi.

2.3 Sintesis Tiga Pilar: Keislaman, Keindonesiaan, dan Kemanusiaan

Salah satu kontribusi terpenting Syafii Maarif adalah kemampuannya untuk mensintesis tiga pilar identitas secara harmonis: Keislaman, Keindonesiaan, dan Kemanusiaan (Maarif, 2021). Ia menolak pandangan yang mempertentangkan antara menjadi seorang Muslim dan menjadi seorang Indonesia. Baginya, keduanya saling menguatkan. Menjadi Muslim yang baik di Indonesia berarti menjadi warga negara Indonesia yang baik, yang setia pada Pancasila sebagai falsafah bangsa dan UUD 1945 sebagai kontrak sosial bersama (Nuraini, 2023).

Pancasila, dalam pandangannya, tidak bertentangan dengan nilai-nilai universal Islam. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa selaras dengan prinsip tauhid; Kemanusiaan yang Adil dan Beradab adalah cerminan dari misi rahmatan lil 'alamin; Persatuan Indonesia sejalan dengan semangat ukhuwah (persaudaraan); Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan adalah manifestasi dari prinsip syura (musyawarah); dan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah tujuan utama dari syariat Islam (Andri Oktavianus, 2017).

Ketiga pilar ini—Keislaman yang substantif, Keindonesiaan yang inklusif, dan Kemanusiaan yang universal—membentuk sebuah visi yang utuh. Islam memberikan landasan moral dan spiritual, Indonesia memberikan konteks sosial-politik yang konkret, dan Kemanusiaan memberikan orientasi universal yang melampaui sekat-sekat primordial. Visi inilah yang menjadi fondasi etis bagi sebuah model pendidikan damai yang relevan dan "membumi".

3. Titik Temu dan Sintesis: Merumuskan "Pendidikan Damai yang Membumi"

Bagian ini merupakan jantung analisis dari artikel ini, di mana sebuah jembatan konseptual dibangun secara sistematis antara kerangka analisis sosial-kritis Johan Galtung dan kerangka etis-teologis Ahmad Syafii Maarif. Pada pandangan pertama, kedua pemikir ini berasal dari dunia yang berbeda: Galtung adalah seorang sosiolog sekuler dari Skandinavia, sementara Syafii Maarif adalah seorang sejarawan dan pemikir Muslim dari Indonesia. Namun, pada level analisis yang lebih dalam, ditemukan titik-titik temu (konvergensi) yang fundamental, yang memungkinkan sebuah sintesis yang kuat dan koheren.

Sinergi antara kedua pemikiran ini dapat dipahami melalui sebuah metafora: Galtung menyediakan bahasa diagnostik yang akurat untuk "membaca" penyakit-penyakit sosial yang tersembunyi, sementara Syafii Maarif menyediakan bahasa transformatif yang memberikan "resep" etis dan motivasi spiritual untuk penyembuhan. Galtung, dengan konsep kekerasan struktural dan kulturalnya, memberi kita alat untuk menamai dan menganalisis mekanisme penindasan yang seringkali tak terlihat dan tak disadari. Ia membongkar "bagaimana" ketidakadilan bekerja dalam sistem. Di sisi lain, Syafii Maarif, dengan visi Islam substantifnya, memberikan landasan "mengapa" kita harus melawan ketidakadilan tersebut. Ia mengartikulasikan bahwa perjuangan untuk keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan adalah panggilan iman yang paling otentik.

Kombinasi ini menghasilkan sebuah model yang tidak hanya tajam secara kritis, tetapi juga mendalam secara spiritual. Model ini secara inheren bersifat "membumi" karena ia memaksa terjadinya dialog konstan antara yang sakral dan yang sosial. Visi Syafii Maarif untuk "membumikan" ajaran luhur Islam dalam realitas keindonesiaan bertemu secara sempurna dengan fokus Galtung pada isu-isu konkret dan struktural seperti kemiskinan, diskriminasi, dan eksploitasi. Sintesis ini mencegah pendidikan damai menjadi sekadar wacana teoretis di menara gading, dan sebaliknya, mendorongnya menjadi sebuah praksis yang relevan dengan denyut nadi persoalan masyarakat.

Pemetaan konseptual antara kedua pemikiran tersebut dapat diringkas dalam tabel berikut:

Konsep Kritis Johan Galtung	Gagasan Etis-Teologis Ahmad Syafii Maarif	Implikasi Sintetis untuk "Pendidikan Damai yang Membumi"
Kekerasan Struktural: Sistem dan institusi yang menciptakan ketidakadilan, kemiskinan, dan diskriminasi secara sistemik (Harvard Religion and Public Life, 2023).	Kritik atas Ketidakadilan Sosial & Kesenjangan Ekonomi: Penekanan pada kewajiban Islam untuk membela kaum tertindas (mustadh'afin) dan mewujudkan keadilan sosial sebagai inti dari iman dan manifestasi keberagamaan yang sejati (Maarif, 2021).	Kurikulum pendidikan damai harus secara eksplisit mengintegrasikan analisis kritis terhadap isu-isu struktural (kemiskinan, korupsi, diskriminasi sistemik, kerusakan lingkungan) sebagai bagian dari studi sosial yang dijiwai oleh etika keislaman. Peserta didik diajarkan bahwa memerangi ketidakadilan struktural adalah sebuah bentuk ibadah sosial.

Kekerasan Kultural: Aspek budaya (ideologi, teologi, narasi) yang digunakan untuk melegitimasi kebencian, superioritas kelompok, dan menjustifikasi kekerasan langsung maupun struktural (Galtung, 1990).	Kritik atas Formalisme Agama & Tafsir Eksklusif: Penolakan tegas terhadap tafsir keagamaan yang sempit, tekstualis, anti-pluralisme, dan digunakan untuk membenci kelompok lain. Hal ini dianggap sebagai pengkhianatan terhadap semangat universal rahmatan lil 'alamin (Rahman, 2022).	Pedagogi pendidikan damai harus secara aktif membongkar (deconstruct) dan mengkritisi narasi-narasi keagamaan (dan sekuler) yang intoleran dan eksklusif. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan literasi keagamaan yang kritis, kontekstual, historis, dan humanis, yang mampu membedakan antara esensi ajaran dan penafsiran yang dimanipulasi untuk kepentingan kekuasaan.
Perdamaian Positif: Hadirnya keadilan sosial, kesetaraan, kerja sama, dan harmoni yang berkelanjutan, yang dicapai melalui penghapusan kekerasan struktural dan kultural (GW Blogs, 2020).	Visi Islam Substantif & Kemanusiaan Universal: Tujuan akhir dari ajaran Islam adalah terwujudnya sebuah tatanan masyarakat yang adil ('adl), setara (musawah), toleran, dan sejahtera bagi semua, yang berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan universal yang melintasi batas-batas agama dan bangsa (UMY, 2023).	Tujuan akhir dari "Pendidikan Damai yang Membumi" bukanlah sekadar toleransi pasif (damai negatif), melainkan pembentukan peserta didik sebagai agen perubahan proaktif (active agent of social justice). Mereka dididik untuk tidak hanya "tidak membenci", tetapi untuk secara aktif memperjuangkan keadilan sosial sebagai manifestasi iman yang otentik dan sebagai wujud kewarganegaraan yang bertanggung jawab.

4. Karakteristik Model "Pendidikan Damai yang Membumi"

Berdasarkan sintesis konseptual di atas, model "Pendidikan Damai yang Membumi" dapat diartikulasikan melalui tiga karakteristik utama: tujuan, konten (kurikulum), dan metodologi (pedagogi).

4.1 Tujuan (Aims)

Tujuan fundamental dari model ini adalah untuk melampaui target konvensional pendidikan damai yang seringkali berhenti pada toleransi pasif. Tujuannya bukan sekadar mencetak siswa yang "tidak melakukan kekerasan" (damai negatif), melainkan membentuk warga negara yang aktif, kritis, dan berkomitmen pada keadilan sosial (damai positif). Model ini bertujuan untuk melahirkan profil lulusan yang dapat diibaratkan sebagai "insan kamil" (manusia paripurna) dalam konteks kontemporer: seorang individu yang memiliki kedalaman spiritual, ketajaman intelektual, dan menjadi agen proaktif dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan di tengah masyarakatnya. Ia adalah pribadi yang saleh secara ritual sekaligus saleh secara sosial.

4.2 Konten (Curriculum)

Kurikulum dalam model "Pendidikan Damai yang Membumi" bersifat integratif dan kontekstual.

- (1) Integrasi Holistik: Model ini menolak dualisme ilmu yang dikritik Syafii Maarif. Artinya, tidak ada pemisahan kaku antara mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dengan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Sejarah, atau Sosiologi. Sebagai contoh:
 - (a) Materi PAI tentang zakat, infak, dan sedekah tidak hanya diajarkan sebagai kewajiban ritual, tetapi dihubungkan langsung dengan analisis kritis tentang akar kemiskinan struktural, ketimpangan ekonomi, dan kebijakan publik yang berpihak pada kaum miskin.
 - (b) Kajian tentang konsep ukhuwah Islamiyah (persaudaraan Islam) dan ukhuwah insaniyah (persaudaraan kemanusiaan) tidak berhenti pada dalil-dalil normatif, tetapi dilanjutkan dengan studi kasus nyata tentang resolusi konflik antar-etnis atau antar-agama di berbagai daerah di Indonesia.
 - (c) Pelajaran sejarah Islam tidak hanya berfokus pada kejayaan militer, tetapi juga menyoroti periode-periode di mana peradaban Islam mampu membangun masyarakat pluralistik yang adil dan inklusif.
- (2) Studi Kasus Kontekstual: Kurikulum secara aktif menggunakan isu-isu sosial kontemporer di Indonesia sebagai bahan ajar utama. Laporan-laporan tentang pelanggaran KBB dari Wahid Foundation atau SETARA Institute, berita tentang konflik agraria, kasus korupsi, atau kebijakan publik yang diskriminatif dijadikan "laboratorium sosial" di dalam kelas. Isu-isu ini kemudian dianalisis menggunakan pisau bedah konseptual dari Galtung (mengidentifikasi kekerasan struktural/kultural) dan dievaluasi berdasarkan prinsip-prinsip etis dari pemikiran Syafii Maarif (keadilan, kemanusiaan, masalah 'ammah).

4.3 Metodologi (Pedagogy)

Metode pembelajaran dalam model ini dirancang untuk memberdayakan siswa menjadi pemikir kritis dan pelaku perubahan, bukan penerima pasif pengetahuan.

- (1) Dialogis dan Kritis: Proses belajar-mengajar harus meninggalkan model ceramah satu arah yang dogmatis. Sebaliknya, ia harus mendorong debat, diskusi kritis, dan dialog antar-keyakinan (Sukron Romadhon, Try Subakti, 2020). Metode seperti bahtsul masa'il (pembahasan masalah-masalah aktual) yang lazim di lingkungan pesantren dapat diadopsi dan diperluas untuk membahas isu-isu sosial-politik kontemporer (Rouf Tamim, 2022). Siswa dilatih untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan sulit, menantang asumsi, dan membangun argumen yang rasional dan berbasis data.
- (2) Reflektif dan Transformatif: Pedagogi ini mendorong siswa untuk melakukan refleksi mendalam tentang posisi dan privilese mereka sendiri di dalam struktur sosial. Mereka diajak untuk bertanya: "Bagaimana struktur sosial yang ada menguntungkan atau merugikan saya dan orang lain?", "Bagaimana ajaran agama saya memanggil saya untuk bertindak dalam menghadapi ketidakadilan ini?" Tujuannya adalah untuk memicu transformasi kesadaran dari apatis menjadi empatik dan peduli.
- (3) Berbasis Proyek dan Aksi Sosial: Pembelajaran tidak berhenti di dalam kelas. Siswa didorong dan difasilitasi untuk merancang dan melaksanakan proyek-proyek aksi sosial berskala kecil di komunitas mereka. Proyek ini bisa berupa kampanye anti-hoax dan anti-ujaran kebencian di media sosial, mengorganisir program bakti sosial yang

melibatkan kelompok lintas agama, melakukan advokasi sederhana kepada pemerintah lokal terkait isu lingkungan, atau mengadakan forum dialog antar-kelompok pemuda yang berbeda latar belakang. Melalui aksi nyata ini, siswa belajar bahwa perdamaian dan keadilan bukanlah konsep abstrak, melainkan sesuatu yang harus diperjuangkan secara aktif.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa sintesis pemikiran Islam substantif Ahmad Syafii Maarif dengan konsep Positive Peace Johan Galtung menghasilkan kerangka konseptual “Pendidikan Damai yang Membumi” yang menawarkan kontribusi teoretis dan praksis bagi pengembangan pendidikan perdamaian di Indonesia. Sintesis tersebut memperlihatkan adanya konvergensi epistemologis dan aksiologis antara visi Islam humanis Syafii Maarif yang menempatkan kemanusiaan, keadilan, dan keberagaman sebagai basis etis kehidupan bersama dengan perspektif Galtung yang memandang perdamaian tidak semata-mata sebagai ketiadaan kekerasan langsung, tetapi sebagai transformasi terhadap kekerasan struktural dan kultural. Atas dasar itu, pendidikan damai perlu bergerak melampaui paradigma toleransi yang bersifat normatif menuju pendidikan transformatif yang membangun kesadaran kritis, keberanian moral, dan kapasitas peserta didik untuk mengenali serta merespons berbagai bentuk ketidakadilan. Model yang dirumuskan memiliki relevansi strategis dalam menghadapi polarisasi, intoleransi, dan fragmentasi sosial di Indonesia karena mengintegrasikan dimensi teologis, sosial, pedagogis, dan kemanusiaan secara simultan. Implementasinya menuntut penguatan kurikulum PAI, pengembangan bahan ajar kontekstual-dialogis, peningkatan kapasitas pendidik, inovasi pembelajaran di sekolah, madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi, serta kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan organisasi keagamaan. Selanjutnya, pengembangan pilot project dan penelitian empiris lintas konteks diperlukan untuk menguji validitas, efektivitas, dan adaptabilitas model tersebut. Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini terletak pada perumusan paradigma pendidikan damai yang tidak hanya berorientasi pada reproduksi nilai toleransi, tetapi pada transformasi kesadaran dan struktur sosial menuju perdamaian yang berkeadilan, sekaligus memperkuat posisi tradisi Islam humanis sebagai sumber epistemologis dan etis dalam pembangunan perdamaian berkelanjutan di Indonesia.

REFERENSI

- Andri Oktavianus. (2017). Pemikiran Ahmad Syafii Maarif tentang Pendidikan Karakter Bangsa (1995-2009). Diakses dari <https://eprints.ums.ac.id/38108/25/Naskah%20Publikasi.pdf>
- Atack, I (2009) 'Peace studies and social change: The role of ethics and human agency', Policy and Practice: A Development Education Review, Vol. 9, Autumn, pp. 39-51. Diakses dari <https://www.developmenteducationreview.com/sites/default/files/article-pdfs/atack%20focus%203.pdf>
- Ayuningtyas, E. A. (2014). Pendidikan Islam dalam Pemikiran Ahmad Syafii Maarif [Tesis, UIN Sunan Kalijaga]. Digilib UIN Suka. Diakses dari https://digilib.uin-suka.ac.id/15289/2/1120410027_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf
- Burak Ercoşkun. (2021). On Galtung's Approach to Peace Studies. Diakses dari https://www.researchgate.net/publication/348562259_On_Galtung's_Approach_to_Peace_Studies
- Galtung, J. (1969). Violence, Peace, and Peace Research. *Journal of Peace Research*, 6(3), 167-191.
- Galtung, J. (1990). Cultural Violence. *Journal of Peace Research*, 27(3), 291-305.
- GW Blogs. (2020). Negative and Positive Peace Framework. Diakses dari <https://blogs.gwu.edu/ccas-panamericanos/peace-studies-wiki/peace-studies-wiki/approaches-to-peace/negative-and-positive-peace-framework/>
- Halimatus Sa'diyah, Sri Nurhayati. (2020). Pendidikan Perdamaian Perspektif Gus Dur. Diakses dari <https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/tadris/article/download/2759/1577/>
- Harvard Religion and Public Life. (2015). Peace and Violence. Diakses dari <https://rpl.hds.harvard.edu/what-we-do/our-approach/peace-violence>
- M. Ali (2016). Pemikiran Pendidikan Islam Ahmad Syafii. *Journals UMS*. Diakses dari <https://journals.ums.ac.id/profetika/article/download/5293/3516>
- M. Lintang Maulana Zulfan (2022). Pemikiran Buya Syafii Maarif tentang Agama dan Negara: Kritik Elit Politik yang Bawa-bawa Agama. Diakses dari <https://islami.co/pemikiran-buya-syafii-maarif-tentang-agama-dan-negara-kritik-elit-politik-yang-bawa-bawa-agama/>
- MAARIF Institute. (2023). Home. Diakses dari <https://maarifinstitute.org/en/>
- Maarif, A. S. (2021). *Islam, Humanity, and Indonesian Identity: Reflections on history*. Leiden University Press.
- Mentari Angela, Wahyu Edi Tanaya. *Jurnal Pendidikan Nilai dan Pembangunan Karakter*. (2021). Intoleransi dan Politik Identitas Kontemporer di Indonesia. Diakses dari <https://waskita.ub.ac.id/index.php/waskita/article/view/343/168>
- MM Habibi. (2023). Intepretasi dan Implikasi MBKM Terhadap Pengembangan Kurikulum Program Studi Pendidikan Agama Islam UII. el-Tarbawi. Diakses dari <https://journal.uii.ac.id/Tarbawi/article/view/26988>
- Muhammad Fuad Fathul Majid (2023) *PEMIKIRAN INKLUSIF AHMAD SYAFI'I MAARIF DALAM PENGEMBANGAN AGAMA DI INDONESIA, 1998-2022* M. Masters thesis, UIN SUNAN

- KALIJAGA YOGYAKARTA. Diakses dari https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/65874/1/20201022001_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
- Muslihah, Eneng. "Pesantren Dan Pengembangan Pendidikan Perdamaian Studi Kasus Di Pesantren An-nidzomiyyah Labuan Pandeglang Banten." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, vol. 14, no. 2, 2014, pp. 311-340, doi:10.24042/ajsk.v14i2.693. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/58350-ID-pesantren-dan-pengembangan-pendidikan-pe.pdf>
- Nuraini Nuraini. (2023). *Islam dan Ideologi Negara dalam Tinjauan: Relevansi Pemikiran Ahmad Syafii Maarif dalam Konteks Indonesia Dewasa Ini*. Diakses dari <https://jurnal-maarifinstitute.org/index.php/maarif/article/view/213>
- Nurul Akbar, Alwizar Alwizar, Djeprin E Hulawa. (2024). *Pembaharuan Pendidikan Islam Menurut Syafi'i Ma'arif dan Hasyim Muzaddi*. Diakses dari <https://www.idebahasa.or.id/escience/index.php/home/article/download/104/75>
- Pujangga Candrawijyaning Fajri (2024). *Dominasi Politik Identitas dalam Kontestasi Politik Indonesia dan Mitigasinya Jelang Pemilu 2024*. Diakses dari <https://talenta.usu.ac.id/politeia/article/download/14360/7654/63108>
- Rahman, S. (2022). *Politik Identitas di Indonesia [Tesis, UIN Alauddin Makassar]*. Repositori UIN Alauddin Makassar. http://repositori.uin-alauddin.ac.id/28521/1/80100222032_Syahril%20Rahman.pdf
- Rouf Tamim. (2022). *Pendidikan Islam di Indonesia (Model Pesantren dan Madrasah)*. Diakses dari <https://journal.staittd.ac.id/index.php/at/article/download/175/160/551>
- Setara Institute. (2008). *Berpihak dan Bertindak Intoleran: Intoleransi Masyarakat dan Restriksi Negara dalam Kebebasan Beragama/Berkeyakinan*. Diakses dari <http://setara-institute.org/wp-content/uploads/2014/11/Berpihak-dan-Bertindak-Intoleran-Laporan-KBB-2008-Setara-Institute.pdf>
- Suara Muhammadiyah. (2016, 24 Oktober). *Syafii Maarif: Apa Betul Kita Umat Terbaik?* Diakses dari <https://web.suaramuhammadiyah.id/2016/10/24/syafii-maarif-apa-betul-kita-umat-terbaik/>
- Sukron Romadhon, Try Subakti. *Journal of Constitutional Law and Governance*. (2022). *Toleransi dan Politik Identitas: Studi tentang Perilaku Politik Kebangsaan di Indonesia*. Diakses dari <https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/asshahifah/article/view/7475>
- UMY. (2023). *Kenang Satu Tahun Syafii Maarif: Pemikiran Buya Syafii Perlu Diwarisi*. Diakses dari <https://www.umi.ac.id/kenang-satu-tahun-syafii-maarif-pemikiran-buya-syafii-perlu-diwarisi/>
- Vision of Humanity. (2020). *Johan Galtung and the Quest to Define the Concept of Peace*. Diakses dari <https://www.visionofhumanity.org/introducing-the-concept-of-peace/>
- Wafi, M. H. (2020). *Faith-Based Diplomacy Nahdlatul Ulama': Diskursus Perdamaian Timur Tengah [Tesis, UIN Sunan Kalijaga]*. Digilib UIN Suka. Diakses dari https://digilib.uin-suka.ac.id/40804/1/17200010055%20_BAB-I_BAB-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
- Wahid Foundation. (2022). *Wahid Foundation Diskusikan Laporan Kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2020-2022*. Diakses dari

<https://wahidfoundation.org/news/detail/Wahid-Foundation-Diskusikan-Laporan-Kemerdekaan-Beragama-dan-Berkeyakinan-di-Indonesia-Tahun-2020-2022>

Wahid Foundation. (2023). Program Sekolah Damai. Diakses dari <https://wahidfoundation.org/program/sekolah-damai>